



DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TAHUN 2005 - 2009

Direktorat
Kebudayaan

2

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
JAKARTA, 2008



910.2
REN



**PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : PM/KP.403/MKP/2008**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS RENCANA STRATEGIS
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2005 - 2009**

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran kebudayaan dan pariwisata dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan telah ditetapkan komitmen yang bersifat strategis di bidang kebudayaan dan pariwisata, berupa **Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2005 - 2009;**
 - b. bahwa dalam upaya lebih memperjelas kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi, misi dan strateginya, diperlukan adanya penyempurnaan dan perbaikan Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2005-2009 dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan perubahan atas Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2005 - 2009, dengan Peraturan Menteri;
-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470).
3. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 -2009;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2006;
-

9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/ HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/ HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2005 - 2009.**

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Pertama Atas Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2005 - 2009 yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



Ir. JERO WACIK, SE



Lampiran : Peraturan Menteri Kebudayaan
Dan Pariwisata Tentang Perubahan
Pertama Atas Rencana Strategis
Departemen Kebudayaan dan
Pariwisata Tahun 2005 - 2009
Nomor : P.M. 46/KP. 403/MKP/2008
Tanggal : 3 Juni 2008

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat dalam menyelesaikan krisis yang dihadapi oleh bangsa dan negara di tahun 1997/98 memacu pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk menyiapkan segenap perubahan yang perlu dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Bidang pariwisata dan bidang kebudayaan telah mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih handal dan berkelanjutan. Meskipun demikian, transformasi dan reformasi yang telah menghasilkan berbagai perubahan tersebut masih belum mencapai hasil yang memuaskan. Bahkan berbagai langkah transformasi dan reformasi awal telah menghasilkan berbagai implikasi rumit yang harus dan terus menuntut pemecahan masalah yang lebih sistematis dan konsisten. Permasalahan dan tantangan pembangunan bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menentukan agenda, sasaran serta program pembangunan yang juga harus bersifat lintas kaitan dan lintas koordinasi.

Proses globalisasi yang dimotori oleh kemajuan di bidang "*Triple T*": *Tourism, Telecommunication, dan Transportation* telah mendorong berbagai negara mengembangkan ketahanan budaya agar dapat bertahan dari terpaan globalisasi serta mengembangkan pariwisata sebagai usaha kemajuan ekonomi bangsanya. Upaya ini dilakukan berbagai negara, tak terkecuali Indonesia terus berupaya mengembangkan kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu andalan Pemerintah dalam memulihkan dari kondisi krisis bangsa.

Dalam kenyataan yang sesungguhnya pengembangan kebudayaan Indonesia menjadi terlanjur disebabkan perhatian yang kurang terhadap arti penting kebudayaan. Padahal kebudayaan itu sangat penting sebagai alat perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dalam pergaulan antarbangsa yang sesungguhnya. Setiap negara akan berusaha tampil dengan kelengkapan budayanya sebagai jatidiri yang membedakan dengan negara lainnya. Di samping itu, pembangunan kebudayaan nasional didorong oleh kebutuhan akan media sosial yang dapat mempersatukan bangsa merupakan tenaga yang kuat dan menjadi dasar kebanggaan suatu bangsa.

Adapun persoalan dalam pengembangan kebudayaan saat ini adalah **bagaimana membangun karakter bangsa (*nation and character building*), serta bagaimana setiap warganegara diberi akses untuk saling mengenal kebudayaan yang berbeda agar dapat hidup berdampingan secara damai** sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*) dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk itu prioritas pembangunan kebudayaan perlu diarahkan untuk **MENGEMBANGKAN KEBUDAYAAN YANG BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI LUHUR** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan agar benturan-benturan yang terjadi tidak melebar menjadi konflik sosial; (2) mendorong tuntasnya proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya Negara kebangsaan Indonesia modern yang berkelanjutan, dan menguatnya masyarakat sipil; (3) revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional; serta (4) meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk dalam negeri. Serta memperkuat harmoni yang ada dan mencegah tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidakadilan sehingga terbangun masyarakat sipil yang kokoh, termasuk membangun kembali kepercayaan sosial antarkelompok masyarakat; dan memperkuat dan mengartikulasikan identitas bangsa.

Disamping itu sasaran pengembangan kebudayaan dalam Rencana **Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 - 2009** adalah:

- 1) Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat.
 - 2) Semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang
-

berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- 3) Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan
- 4) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya.

Secara lebih terfokus sasaran kebudayaan yang telah ditetapkan dalam RPJMN diatas telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Nasional untuk tahun 2005 - 2009 yaitu :

- 1) Terwujudnya **kesadaran masyarakat** untuk **melestarikan kebudayaan** sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya yang negatif.
- 2) Terwujudnya **industri** dan **karya budaya** yang mengacu pada budaya bangsa, dan perlindungan hukum individual dan komunal.
- 3) Terwujudnya **sikap saling menghargai** dan **menghormati di antara berbagai komunitas budaya** untuk memperkuat ikatan kebangsaan.

Di bidang pembangunan pariwisata, potensi dan peranannya sebagai salah satu sektor penghasil devisa utama senantiasa terus ditingkatkan. Jumlah perolehan devisa ditentukan oleh jumlah kunjungan, pengeluaran, dan lama kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia, maka salah satu sasaran keberhasilan pengembangan pariwisata, sebagai sumber penghasil devisa dinilai dari unsur yaitu :

- 1) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (*foreign tourist*)
- 2) pengeluaran wisatawan mancanegara (*foreign tourist expenditures*) per wisatawan, per hari dan per kunjungan;
- 3) lama tinggal wisatawan mancanegara (*foreign tourist length of stay*).

Apabila kita melihat kecenderungan pariwisata tahun 2020, perjalanan wisata dunia akan mencapai 1,5 miliar orang, di antaranya 438 juta orang akan berkunjung ke kawasan Asia-Pasifik dan 100 juta orang ke Cina. Melihat jumlah yang demikian besar wisatawan, maka Indonesia yang dapat menawarkan segala daya tariknya untuk mendatangkan wisatawan, perlu merebut pangsa pasar wisata tersebut.

Pada tahun 2004, pengeluaran wisatawan internasional di seluruh dunia mencapai USD 623 miliar, dimana USD 124,97 miliar di antaranya diterima oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik (WTO, 2005). Dengan perolehan sebesar USD 4,798 miliar pada tahun 2004, penerimaan devisa dari pariwisata Indonesia baru mewakili 0,77% dari pengeluaran wisatawan dunia. Angka tersebut dinilai masih sangat kecil, walaupun demikian dengan pulihnya perekonomian Indonesia serta semakin baiknya kondisi keamanan dan politik nasional, wisatawan internasional ke Indonesia diperkirakan akan mencapai 10 juta orang pada tahun 2009 dengan perolehan devisa mencapai lebih dari USD 10 miliar.

Selain itu, perjalanan wisata di dalam negeri juga diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sejalan dengan semakin meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat. Pada tahun 2004 diperkirakan akan terdapat 103 juta wisatawan Nusantara yang menghasilkan 195 juta perjalanan Wisata Nusantara. Dengan angka sebesar itu diperkirakan jumlah wisatawan nusantara di akhir tahun 2009 akan menembus angka 112 juta orang dengan jumlah perjalanan wisata lebih dari 226 juta *trips*. Angka-angka tersebut memberikan harapan terhadap peningkatan di bidang investasi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kontribusi kegiatan pariwisata terhadap pendapatan masyarakat dan pemerintah.

Untuk mengukur kinerja pembangunan pariwisata dengan mengacu kepada aspek ekonomi, sejak tahun 2001 telah dilakukan penghitungan menggunakan metodologi dari *World Tourism Organization* (WTO) yaitu Neraca Satelit Pariwisata Nasional yang secara garis besar adalah pada tahun 2005 jumlah pendapatan dari kepariwisataan mencapai hampir Rp 152,24 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 6,55 juta orang (Nesparnas 2005), maka diperkirakan pada tahun 2009 jumlah pendapatan dari kepariwisataan akan mencapai lebih dari Rp 200 triliun dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 10 juta orang. Dengan menggunakan data Nesparnas 2005 sebagai acuan, maka pada tahun 2009 diperkirakan tercipta perputaran uang (sebagai akibat dari *multiplier effect*) sebesar Rp 337,5 triliun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 -2009 menjelaskan bahwa salah satu sasaran untuk meningkatkan sektor non migas adalah dengan meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa menjadi sekitar USD 8 miliar pada tahun 2009, sehingga sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penghasil devisa besar. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan pembangunan kepariwisataan

diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran melalui kegiatan promosi dan pengembangan produk-produk wisata serta meningkatkan sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata. Dari sasaran dalam RPJMN 2004 - 2009 maka telah ditetapkan juga sasaran pembangunan kepariwisataan nasional seperti yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Nasional 2005 -2009 yaitu :

- 1) Terwujudnya pariwisata Indonesia (Nasional);
- 2) Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian;
- 3) Meningkatnya produk dan pelayanan pariwisata yang memiliki keunggulan komparatif;
- 4) Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan masing-masing potensi daerah;
- 5) Meningkatnya peran Indonesia dalam kerjasama dan persahabatan antar bangsa dengan dilandasi oleh sikap saling menghargai;

1. Wisatawan Nusantara.

Dalam kurun waktu 2005 - 2009, sasaran secara kuantitatif sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Perjalanan Wisatawan Nusantara (Pertumbuhan rata-rata per tahun):

Tahun	Jumlah Wisnus
2005	206.000.000
2006	209.000.000
2007	220.000.000
2008	223.000.000
2009	226.000.000

- b. Jumlah pengeluaran wisnus pada akhir tahun 2009 menjadi Rp. 82,26 triliun, dengan jumlah kunjungan sebesar 226 juta.

2. Wisatawan Mancanegara.

Target wisman, penerimaan devisa dan pengeluaran wisman per-kunjungan periode 2005 - 2009 adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Wisman	Devisa	Pengeluaran (USD)
2005	5.000.000	US\$ 5 Miliar	1,000
2006	5.500.000	US\$ 5.5 Miliar	1,000
2007	6.000.000	US\$ 6 Miliar	1,000
2008	7.000.000	US\$ 7 Miliar	1,000
2009	8.000.000	US\$ 8 Miliar	1,000

3. Kesempatan Kerja.

- a. Kesempatan Kerja pada akhir tahun 2009 menjadi 10 juta.
- b. Perkiraan kesempatan kerja yang diciptakan industri pariwisata pada tahun 2009 dibuat berdasarkan rata-rata tingkat pertumbuhan pengeluaran wisatawan (wisman & wisnus). Data dasar yang digunakan adalah kesempatan kerja pada Neraca Satelit Pariwisata Nasional (NESPARNAS) 2005 yaitu sebesar 6,55 juta.

Atas dasar gambaran tersebut di atas, pengelolaan kebudayaan dan kepariwisataan perlu didukung oleh kebijakan nasional, karena terdapat konsekuensi kewajiban pemerintah bagaimana mengelola kebudayaan yang beragam atau multikultur untuk diarahkan pada nilai-nilai inti sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai inti tersebut akan menjadi kekuatan integratif terhadap kebudayaan lokal yang bersifat majemuk. Pemerintah juga berkewajiban bagaimana mengembangkan kepariwisataan sebagai suatu alat atau media pengembangan budaya dan peningkatan kualitas hubungan antarmanusia dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Dengan mengacu kepada berbagai kondisi tersebut di atas, pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan Indonesia dapat dijabarkan ke dalam berbagai langkah yang memerlukan keterpaduan seluruh pihak. Langkah strategis untuk mengembangkan kebudayaan nasional adalah menginventarisasi, mendokumentasi, dan merekam semua aset kebudayaan nasional.

Di samping itu juga dilakukan langkah-langkah penting untuk melindungi aset budaya tersebut melalui peraturan per-undang-undangan yang berlaku. Langkah ini penting dilakukan agar data dan informasi itu dapat dikaji untuk menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu perlu pula diidentifikasi hubungan kebudayaan antara suku bangsa yang satu dengan yang lain, dan bahkan dengan bangsa-bangsa lain. Langkah strategis selanjutnya ialah melakukan upaya penanaman nilai-nilai budaya, baik yang bersifat daerah maupun nasional, melalui pendidikan dalam arti luas, oleh

karena pendidikan itu sendiri pada hakikatnya merupakan suatu proses pembudayaan.

Sedangkan langkah strategis dalam pengembangan kepariwisataan nasional adalah meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional, mempermudah pergerakan wisatawan menuju dan ke Indonesia, mengembangkan destinasi baru di luar Pulau Jawa dan Bali, mengembangkan kegiatan wisata yang potensial, serta menumbuhkembangkan pariwisata nusantara.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagai instansi pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2005 -2009 (Renstra Depbudpar 2005 - 2009) ini merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 - 2009, yang menyebutkan bahwa Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen berkewajiban menyusun rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra Depbudpar 2005 - 2009 ini dikondisikan untuk menjawab agenda pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur; peningkatan daya saing pariwisata serta penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa seperti yang tertuang dalam RPJMN 2004 - 2009.

Oleh karenanya, Renstra Depbudpar 2005 - 2009 ini merupakan pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Depbudpar. Dokumen Renstra Depbudpar ini akan menjadi dokumen dasar penyusunan Renstra Eselon I dan Eselon II di lingkup Depbudpar. Disamping itu Renstra Depbudpar ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Depbudpar dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Depbudpar. Dimana kedua rencana ini akan menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

B. Organisasi dan Peran Departemen

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor : PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 07/HK.001/MKP-2007. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah, dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- 2) pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 4) pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- 5) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden,

Salah satu kontribusi yang dapat diberikan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata adalah ikut mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional melalui stimulasi pembangunan sektor riil yang berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata. Diharapkan dengan bergulirnya kegiatan kebudayaan dan pariwisata, kegiatan riil perekonomian seperti industri transportasi, industri hotel dan akomodasi, industri restoran dan makanan, serta industri kerajinan rakyat dapat mulai berputar secara cepat. Dengan berputarnya kegiatan sektor riil, kegiatan dan fungsi perbankan juga diharapkan mulai kembali menyentuh sektor-sektor ini tanpa takut lagi dananya tertanam tanpa berputar dalam sektor-sektor riil yang dibiayainya. Dengan demikian dari gambaran singkat tersebut jelas terlihat peran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan lintas sektor nasional. Hal ini merupakan implementasi Renstra 2005-2009.

Diharapkan berbagai kajian yang telah dilakukan di daerah konflik maupun daerah yang berpotensi konflik yang hasilnya dapat membantu memecahkan masalah dan memberikan solusi dengan pendekatan berdasar. Namun demikian, sebagaimana juga pada sektor-sektor pembangunan lainnya, sektor pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga tergantung pada pembangunan pada sektor-sektor lain yang terkait. Setidaknya agar pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata memiliki iklim yang kondusif, sektor-sektor ekonomi dan penunjang seperti perhubungan, keamanan, keselamatan, imigrasi, bea dan cukai, karantina dan unsur-unsur terkait dalam masyarakat lainnya harus turut juga memberikan dukungannya.

Satu faktor yang dominan belakangan ini adalah masalah keamanan lokal, regional maupun nasional Indonesia. Tanpa terciptanya persepsi keamanan yang positif dikalangan pelaku industri kebudayaan dan pariwisata, perputaran ekonomi kebudayaan dan pariwisata akan lambat bahkan dapat berhenti sama sekali. Untuk menanggulangi hal-hal yang terkait dengan kebudayaan dan pariwisata telah diatur dalam INPRES Nomor : 16/2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.

C. Pola Pikir dan Sistematika Penulisan

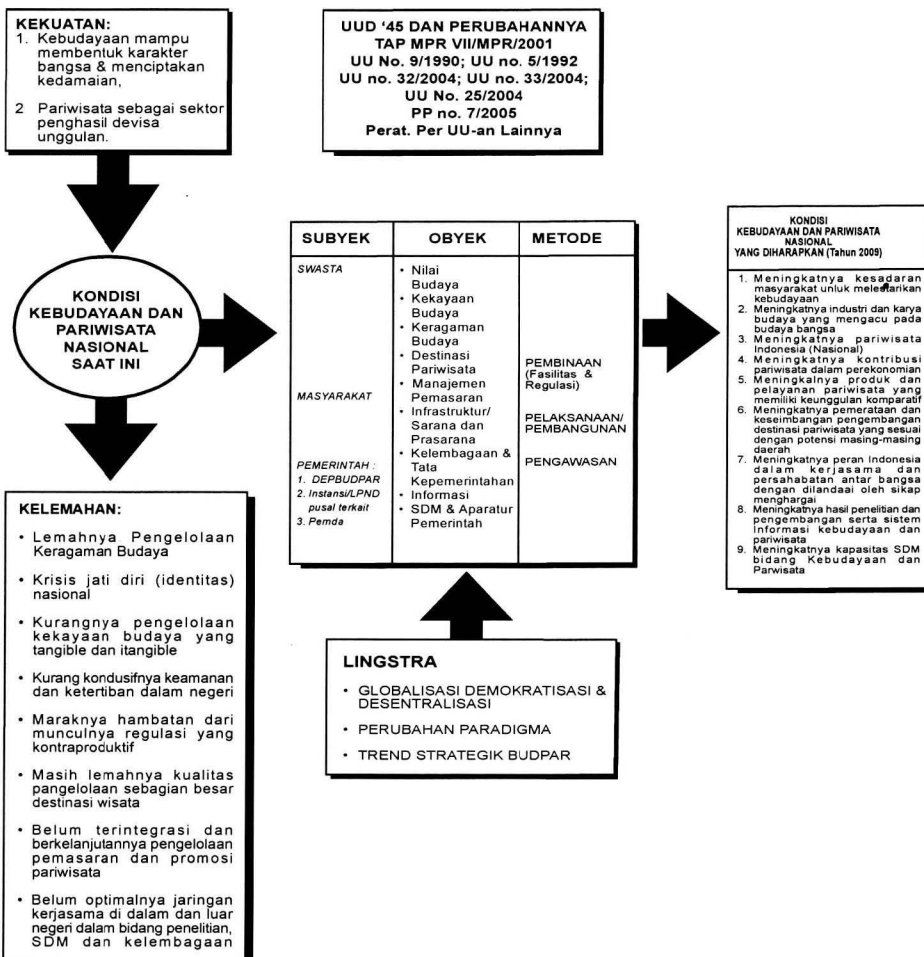
1. Konteks Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Penyusunan dokumen Renstra Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ini didasarkan atas **Peraturan Presiden RI nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004 - 2009** serta Dokumen Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Nasional 2005 - 2009. RPJMN merupakan dasar penyusunan tahunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat agenda dan kebijakan pemerintah. Dokumen Renstra Depbudpar ini akan menjadi dokumen dasar penyusunan Renstra Eselon I dan Eselon II di lingkup Depbudpar. Disamping itu Renstra Depbudpar ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Depbudpar dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Depbudpar. Dimana kedua rencana ini akan menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Pola Pikir Pembangunan Budparnas 2005 - 2009

Pola pikir yang dipergunakan dalam penyusunan Renstra Depbudpar 2005 -2009 ini dilakukan dengan mengidentifikasi isu-isu strategik yang berkembang melalui analisis lingkungan eksternal dan internal yang menghasilkan beberapa pokok permasalahan, kekuatan, ancaman dan peluang dalam bidang pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan. Selanjutnya dirumuskan ke dalam strategi pengembangan yang mencakup kebijakan dan program yang kemudian diturunkan dalam kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Selanjutnya pola pikir dapat dilihat pada Gambar 1. sebagai berikut.

Gambar 1. POLA PIKIR PEMBANGUNAN BUDPARNAS 2005 - 2009



3. **Sistematika Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 2005 - 2009**

Dokumen Renstra Depbudpar 2005 -2009 ini mengacu pada :

- a. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II mempunyai Perencanaan Strategik tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Perencanaan strategik yang dimaksud mencakup : (1) Uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi; (2) uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi; (3) Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
- b. Peraturan Presiden RI nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2004 - 2009 di mana dalam Bab 35 Kaidah Pelaksanaan pada butir 2 disebutkan bahwa Kementerian, departemen, lembaga pemerintah non departemen berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
- c. Dengan mengacu pada kedua hal tersebut diatas maka Sistematika penulisan Renstra Depbudpar terbagi ke dalam lima Bab.

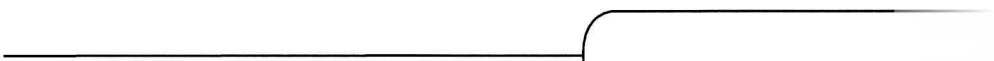
Bab I memuat tentang latar belakang serta kondisi terkini yang dihadapi dalam pembangunan dan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Prioritas pembangunan Kepariwisata dan Kebudayaan serta gambaran tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 tersirat dalam Bab I ini. Disamping itu juga gambaran mengenai struktur organisasi maupun peran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional. Untuk mempermudah pemahaman dan isi dari Renstra Depbudpar, juga akan diulas mengenai pola pikir dan Sistematika penulisannya.

Bab II menggambarkan tentang visi, misi serta nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Renstra Depbudpar 2005 - 2009, Dalam bab ini semakin jelas gambaran keinginan bangsa Indonesia dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan nasional.

Bab III dalam Renstra Depbudpar 2005 - 2009 akan terlihat bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Depbudpar setelah melakukan analisis baik eksternal yang menghasilkan peluang dan ancaman serta analisis internal yang menghasilkan kekuatan dan kelemahan tentang pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Nasional. Dengan upaya-upaya ini diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Depbudpar.

Bab IV akan mengulas tentang tujuan, sasaran strategis yang akan dicapai oleh Depbudpar Tahun 2005 - 2009, Faktor kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta gambaran lengkap sasaran, indikator kinerja dan program.

Bab V berisikan tentang strategi Depbudpar 2005 - 2009 yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan pokok serta Matriks Rencana Strategis Tahun 2005 - 2009.



Gbr 2. Kerangka Penulisan Renstra Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2005 - 2009



BAB II

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI

A. Visi

Berdasarkan latar belakang dan landasan pemikiran yang telah dikemukakan di depan, maka telah tergambar keinginan bangsa Indonesia dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan nasional yang merupakan salah satu penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Berbagai dasar pemikiran telah dirumuskan sebagai rambu-rambu di dalam Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Nasional pada masa mendatang yang penuh dengan harapan dan tantangan, yang harus dipedomani oleh insan kebudayaan dan kepariwisataan untuk lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berencana dan berkesinambungan.

Untuk itu Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang merupakan salah satu pelaku pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan nasional merumuskan Visi sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA JATIDIRI BANGSA, PERSATUAN DAN KESATUAN
BANGSA DALAM KERANGKA MULTIKULTURAL, KESEJAHTERAAN
RAKYAT DAN PERSAHABATAN ANTAR BANGSA”**

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi Departemen yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, misi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2005 - 2009 adalah :

1. Melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan nilai luhur.
2. Mendukung pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang berdaya saing global.
3. Melakukan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan akuntabel.

C. Nilai-Nilai

Berdasarkan visi dan misi diatas maka ditetapkan 9 (sembilan) nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Renstra Depbudpar 2005 - 2009, adapun kesembilan nilai-nilai tersebut adalah :

1. Religius

- a. Mewujudkan aparatur di lingkungan Depbudpar yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya, terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku keseharian;
- b. Mengembangkan toleransi antar dan antara umat beragama;
- c. Mengembangkan terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

2. Manusiawi

- a. Mendorong terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
- b. Mendorong terwujudnya hubungan harmonis antar manusia Indonesia tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, ras, agama dan lain-lain;
- c. Mendorong berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat ke arah peningkatan harkat dan martabat manusia;
- d. Mendorong terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Bersatu

- a. Meningkatkan semangat persatuan dan kerukunan bangsa;
- b. Meningkatkan toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial;
- c. Mengembangkan budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan;
- d. Mengembangkan semangat anti kekerasan;
- e. Mengembangkan dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat.

4. Demokratis

- a. Mewujudkan keseimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara negara dan hubungan kekuasaan antar pemerintah nasional dan daerah;
- b. Mengembangkan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik yang bersifat terbuka;
- c. Mewujudkan mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Mengembangkan budaya demokrasi; transparansi; akuntabilitas, jujur, sportif, menghargai perbedaan;
- e. Mengembangkan sistem kepemimpinan yang egaliter dan rasional.

5. Adil

- a. Menegakkan hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi;
- b. Mewujudkan institusi dan aparat hukum yang bersih dan profesional;
- c. Mewujudkan penegakan hak asasi manusia;
- d. Mewujudkan keadilan gender;
- e. Mewujudkan budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum;
- f. Mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan, sumberdaya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktek monopoli;
- g. Menyediakan peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggal.

6. Sejahtera

- a. Meluaskan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk sehingga bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan mandiri;
- b. Meningkatkan angka partisipasi murni anak usia sekolah;
- c. Mewujudkan sistem pelayanan umum, bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk pelayanan kepada penyandang cacat dan usia lanjut;
- d. Mewujudkan keamanan dan rasa aman dalam masyarakat.

7. Maju

- a. Meningkatkan kemampuan bangsa dalam pergaulan antarbangsa;
- b. Meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerjasama dan bersaing dalam era global;
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan sehingga menghasilkan tenaga yang kompeten sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- d. Meningkatkan disiplin dan etos kerja;
- e. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi serta pembudayaan dalam masyarakat;
- f. Mengaktualisasikan keragaman budaya Indonesia.

8. Mandiri

- a. Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa agar sejajar dengan bangsa lain;
- b. Mendukung terwujudnya politik luar negeri yang berkepribadian dan bebas aktif;
- c. Mewujudkan ekonomi Indonesia yang bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa dan negara;
- d. Memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya Indonesia yang berakar pada potensi budaya daerah.

9. Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara

- a. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN;
- b. Mengusahakan penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk di daerah terpencil dan perbatasan;
- c. Mengembangkan transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan.

BAB III

LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

Perkembangan suatu organisasi dipengaruhi dua faktor penting, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Ketepatan dalam menganalisis ke 2 faktor tersebut memiliki peranan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Hasil analisis lingkungan internal memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi, sedangkan pada faktor eksternal diperoleh informasi tentang peluang maupun ancaman yang dihadapi organisasi.

Berdasarkan hasil analisis kekuatan dan peluang di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan Kekuatan dan Mengoptimalkan Peluang** melalui:
Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan nasional.
 - a. Pengembangan pariwisata nusantara dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air dan jati diri bangsa;
 - b. Pelestarian lingkungan alam dan budaya sebagai upaya mempertahankan kekayaan bangsa dari berbagai perubahan;
 - c. Pemberian penghargaan yang tinggi kepada seniman yang telah melahirkan produk-produk budaya;
 - d. Pengembangan promosi budaya melalui pengiriman misi dan delegasi kebudayaan ke luar negeri;
 - e. Pembuatan film kolosal yang bernuansa budaya.

- 2. Mengembangkan Kekuatan untuk Mengatasi Ancaman** melalui:
 - a. Pengembangan pengelolaan keragaman budaya dalam upaya meningkatkan rasa cinta atas khasanah kebudayaan Indonesia yang beraneka;
 - b. Peningkatan pengelolaan kekayaan budaya sebagai upaya melestarikan kebudayaan daerah yang beragam dan kaya atas kebijakan lokal

(*local wisdom*) dan kepakaran lokal (*local genius*);

- c. Penguatan penegakan hukum guna menjaga upaya-upaya pelestarian kebudayaan dan alam Indonesia sebagai modal pembangunan;
- d. Pengembangan peraturan perundangan dalam rangka memberikan landasan legal pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan Indonesia.

3. Meminimalkan Kelemahan untuk Memanfaatkan Peluang melalui:

- a. Pengembangan nilai budaya untuk melestarikan tradisi, budi pekerti dan karakter bangsa sehingga mampu menghadapi perubahan besar yang melanda dunia;
- b. Pengembangan pemasaran terpadu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran jumlah dan kualitas kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
- c. Pengembangan dan peningkatan daya saing SDM kebudayaan dan pariwisata guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dalam rangka meningkatkan daya saing nasional;
- d. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) sehingga mampu memberikan dukungan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata;
- e. Pengoptimalan kapasitas pusat data dan informasi dalam upaya memperbesar desiminasi informasi pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan kepada masyarakat;
- f. Pengoptimalan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk meningkatkan kapasitas dan peran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan fungsinya sebagai fasilitator dan koordinator pembangunan kebudayaan dan pariwisata
- g. Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif guna meningkatkan peran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagai institusi yang mampu melaksanakan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*);
- h. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata agar sesuai dengan tuntutan dan harapan seluruh stakeholder pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

4. Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman melalui:

- a. Pengelolaan keragaman budaya yang profesional dan sesuai zaman guna meningkatkan daya resistensi terhadap serbuan budaya global yang deras;
- b. Pengembangan kekayaan budaya dalam upaya meningkatkan kualitas aset budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- c. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi dan antar daerah sehingga terjadi keterpaduan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan oleh berbagai pihak yang terkait.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

A. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2005 - 2009, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya pembangunan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur;**
- 2. Terwujudnya pariwisata Indonesia yang berdaya saing global;**
- 3. Terwujudnya pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang bersih dan berwibawa.**

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang akan dicapai Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2005 - 2009 ditetapkan sebagai berikut:

- 1. *Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan.***

Untuk mengatasi arus globalisasi dan konflik sosial di berbagai wilayah di Indonesia, serta melunturnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memiliki kekuatan (*strenght*), yaitu dengan adanya regulasi di bidang kebudayaan dan lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggungjawab di bidang kebudayaan, serta dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelestarian kebudayaan, disamping meningkatnya penggunaan media informasi dan telekomunikasi dalam penguatan kebudayaan.

Dalam kerangka tersebut, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata akan memberikan peran dan kontribusi dalam rangka memperkuat pertahanan budaya masyarakat tersebut dengan menetapkan kesadaran masyarakat sebagai salah satu sasaran yang akan dicapai dalam perencanaan strategis lima tahunan, yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah data kebudayaan yang berhasil diinventarisasi dan di dokumentasikan;
2. Jumlah pengunjung Museum;
3. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya, baik di darat maupun di bawah air serta obyek budaya yang dilestarikan;
4. Jumlah organisasi pemerhati kebudayaan yang memperoleh bantuan;
5. Menurunnya kasus pelanggaran cagar budaya;
6. Jumlah aktivitas/event kebudayaan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia.

2. *Meningkatnya industri dan karya budaya yang mengacu pada budaya bangsa*

Pada saat ini Indonesia memasuki suatu masa yang disebut dengan vasa keempat peradaban manusia, yang ditandai dengan berkembangnya ekonomi kreatif yang berbasis pada industri budaya. Industri budaya dan produk-produk karya budaya telah menjadi tambang baru yang mampu menggerakkan perekonomian dunia. Sebagai bangsa yang sangat kaya memiliki keragaman budaya dengan berbagai produknya maka bangsa Indonesia sangat diuntungkan dengan adanya kondisi tersebut. Berangkat dari pemikiran tersebut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata akan terus berupaya agar kekayaan keragaman budaya bangsa mampu dikembangkan dan berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2005-2009.

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas dapat diukur melalui indikator kinerja di bawah ini:

1. Jumlah produk dan karya budaya yang memiliki nilai ilmu pengetahuan, sosial budaya dan ekonomi tinggi serta diakui di tingkat nasional dan internasional;

3. *Meningkatnya pariwisata Indonesia (Nasional)*

Dengan latar belakang kondisi dan nilai penting kepariwisataan nasional bagi pembangunan perekonomian nasional serta kondisi persaingan ditingkat regional, maka pemerintah semakin mempertegas komitmennya

guna meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan nasional. Berbagai program telah dilakukan melalui kerjasama dengan stakeholders terkait seperti pengembangan promosi yang intensif terhadap pasar utama dan potensial Indonesia melalui operasionalisasi kantor perwakilan pariwisata di luar negeri (Jepang, Australia, Jerman, Malaysia dan China), serta program-program pemasaran strategis lainnya dalam bentuk roadshow, farm trip dan keikutsertaan pada event-event/bursa pariwisata di luar negeri maupun penyelenggaraan event-event internasional di Indonesia.

Namun demikian sejalan dengan perkembangan peta pasar pariwisata internasional, perkembangan industri pariwisata global serta peta persaingan antara destinasi pariwisata baik dalam konteks regional maupun global, dibutuhkan rencana strategis dan program pemasaran pariwisata nasional secara lebih efektif dan efisien, yang mampu mengantisipasi dan menjawab berbagai tantangan dan mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, lama tinggal, tingkat pengeluaran, serta distribusi kunjungan ke berbagai destinasi wisata yang ada.

Untuk wisata nusantara strategi yang diterapkan adalah:

1. Mendorong pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi) untuk aktif melakukan promosi ODTW/potensi ODTW;
2. Mendorong biro perjalanan untuk meningkatkan penjualan/promosi paket-paket wisata domestik;
3. Mendorong media massa untuk meningkatkan penyiaran/penulisan pariwisata yang bersifat promosi ODTW dalam negeri;
4. Meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan wisata dalam negeri;
5. Peningkatan kerjasama promosi antar pusat/daerah dengan pihak terkait.

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja di bawah ini:

1. Prosentase pertumbuhan Wisatawan Mancanegara per tahun;
 2. Jumlah Wisatawan Manca Negara;
 3. Prosentase pertumbuhan Wisatawan Nusantara per tahun;
-
-

4. Jumlah Wisatawan Nusantara;
5. Jumlah Pengeluaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara;
6. Pertambahan jumlah propinsi yang menjadi tempat kunjungan wisnus/wisman.

4. *Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian.*

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perolehan devisa negara adalah melalui sektor pariwisata dimana sektor tersebut sangat potensial untuk dikembangkan mengingat letak geografis Indonesia yang sangat strategis dan heterogen baik dari segi budaya, adat istiadat, serta obyek-obyek wisata sebagai andalan pemerintah dalam rangka memulihkan kondisi krisis serta dalam upaya meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional. Untuk itu pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan untuk meningkatkan devisa, dengan kebijakan pembangunan kepariwisataan, peningkatan efektivitas pemasaran melalui kegiatan promosi dan pengembangan produk-produk wisata yang mampu memenuhi sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata.

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja di bawah ini:

1. Kenaikan jumlah devisa dari Wisatawan Mancanegara;
2. Prosentase peningkatan kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional.

5. *Meningkatnya produk dan pelayanan pariwisata yang memiliki keunggulan komparatif.*

Pengembangan kepariwisataan nasional memiliki dimensi ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan nasional, sangat disadari bahwa tujuan pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam rangka perekonomian nasional. Secara spesifik pengembangan kepariwisataan diharapkan dapat memperbesar penerimaan devisa, memperluas pemerataan dan kesempatan kerja serta mendorong pembangunan daerah. Pada dasarnya, kepariwisataan memiliki peranan yang luas terutama dalam rangka peningkatan ekspor nasional yang saat ini menghadapi persaingan yang ketat di pasar dunia, oleh karena itu

kepariwisataan dapat memacu potensi penerimaan devisa terutama dari kegiatan dan kunjungan Wisatawan Manca Negara.

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja di bawah ini:

1. Jumlah peningkatan aksesibilitas dan fasilitas di setiap destinasi;
2. Jumlah produk dan pelayanan pariwisata yang menerapkan kode etik pariwisata dunia;
3. Kenaikan jumlah event pariwisata yang berpola kemitraan;
4. Prosentase meningkatnya jumlah organisasi/perseorangan yang berusaha di bidang pariwisata.

6. *Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi pariwisata sesuai dengan potensi masing-masing daerah*

Upaya pemerintah untuk menunjang kunjungan Wisatawan Manca Negara ke Indonesia antara lain mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dapat dijual seperti perkembangan pariwisata, misalnya pemerintah Jawa Tengah yang menyelenggarakan peringatan 600 tahun pelayaran admiral Cheng Ho di Semarang. Pelaksanaan kegiatan semacam itu sangat besar artinya bagi upaya peningkatan pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Pertumbuhan sektor pariwisata yang sangat dinamis dan pesat telah memperkuat prediksi dan prospek perkembangan industri pariwisata menjadi sektor ekonomi terbesar dengan pertumbuhan paling pesat dalam perekonomian jasa. Kondisi tersebut dapat dilihat dengan semakin berkembangnya destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Dengan semakin banyaknya wisatawan maka diharapkan pengeluaran yang dilakukan akan dapat meningkatkan tingkat perekonomian pada lokasi wisata yang dituju.

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja di bawah ini:

1. Peningkatan jenis destinasi ekowisata;
2. Peningkatan jenis destinasi wisata bahari;

3. Peningkatan Meeting, Incentive Travel Conference, and Exhibition (MICE).

7. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerjasama dan persahabatan antar bangsa dengan dilandasi oleh sikap saling menghargai

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut dalam alinea IV Preambule yaitu: ... ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta dalam rangka mewujudkan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, maka perlu ditingkatkan peranan Indonesia di berbagai Forum Internasional.

Disadari bahwa pada saat ini citra bangsa Indonesia di Forum Internasional masih belum menggembirakan. Kebudayaan merupakan media yang tepat sebagai sarana promosi dan diplomasi untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia di Forum Internasional tersebut, melalui berbagai macam kegiatan.

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja di bawah ini:

1. Peningkatan jumlah kerjasama internasional di bidang budaya dan pariwisata;
2. Jumlah investasi baru di bidang pariwisata;
3. Jumlah implementasi hasil kesepakatan kerjasama multilateral, bilateral, sub regional di bidang pariwisata.

8. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan serta sistem informasi kebudayaan dan pariwisata

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam beberapa tahun terakhir telah berupaya mengembangkan sistem bagaimana menyampaikan informasi potensi budaya dan pariwisata Indonesia secara komprehensif, cepat, tepat dan efisien baik untuk konsumen (*user*) dalam negeri maupun manca negara. Disamping itu perhatian telah juga dicurahkan kepada kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan terapan untuk selanjutnya diharapkan akan digunakan dalam pengambilan keputusan penyusunan program/kegiatan.

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja di bawah ini:

1. Jumlah keluhan data per tahun;
2. Jumlah hit internet www.budpar.go.id per tahun;
3. Jumlah pengguna intranet per tahun;
4. Jumlah pengguna DSS per tahun;
5. Tingkat persepsi/image positif dari masyarakat Indonesia terhadap Depbudpar;
6. Jumlah penelitian dan pengembangan terapan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
7. Jumlah pola kemitraan di bidang kelitbangan dan pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata.

9. *Meningkatnya kapasitas SDM bidang kebudayaan dan pariwisata*

Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, pemerintah melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah berupaya meningkatkan dan memperkuat jaringan kerjasama antara pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten dan kota), swasta dan masyarakat serta pelaku industri budaya dan pariwisata di dalam maupun di luar negeri melalui pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pembukaan pelatihan kepariwisataan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri khususnya di wilayah Timur Tengah, pemberdayaan institusi sosial dalam rangka revitalisasi kebudayaan melalui Lagoi, pulau Bintan, pelatihan Assessor Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata di lingkungan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP), pelatihan ekowisata bagi pengelola taman nasional, manajemen bagi manajer hotel Melati, pembekalan kepariwisataan bagi petugas imigrasi.

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja di bawah ini:

1. Pemenuhan tingkat kebutuhan pegawai;
 2. Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian;
 3. Jumlah pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
-
-

4. Jumlah UPT yang beroperasi;
5. Tingkat kompetensi pegawai sesuai bidang kerja masing-masing;
6. Jumlah keikutsertaan Diklat Teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Jumlah Diklat Teknis bidang budpar dilaksanakan berdasarkan Rancang Bangun Program Kegiatan.

Gambaran lengkap sasaran, indikator kinerja dan strategi pembangunan kebudayaan dan pariwisata, adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Program
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah data kebudayaan yang berhasil diinventarisasi dan didokumentasikan 2. Jumlah pengunjung Museum 3. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya, baik di darat maupun di bawah air serta obyek budaya yang dilestarikan 4. Jumlah organisasi dan pemerhati kebudayaan yang memperoleh bantuan 5. Menurunnya kasus pelanggaran cagar budaya 6. Jumlah aktivitas/event kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 2. PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 3. PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
2. Meningkatnya industri dan karya budaya yang mengacu pada budaya bangsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah produk dan karya budaya yang memiliki nilai ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan ekonomi tinggi serta diakui di tingkat nasional dan internasional 2. Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang berjasa dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 2. PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 3. PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
3. Meningkatnya pariwisata Indonesia (Nasional)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase pertumbuhan Wisatawan Mancanegara 2. Jumlah Wisatawan Mancanegara 3. Prosentase pertumbuhan Wisatawan Nusantara Jumlah Wisatawan Nusantara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAK-SANAAN 2. PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Sasaran	Indikator Kinerja	Program
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah Pengeluaran Wisnus/ Wisman 5. Pertambahan jumlah provinsi/kabupaten/kota yang menjadi tempat kunjungan Wisnus/Wisman 	<ol style="list-style-type: none"> 3. PENGEMBANGAN PEMASARAN
<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenaikan jumlah devisa dari wisman 2. Prosentase peningkatan kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 2. PENGEMBANGAN PEMASARAN
<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatnya produk dan pelayanan pariwisata yang memiliki keunggulan komparatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambahan jenis pelayanan di pintu masuk 2. Jumlah peningkatan aksibilitas dan fasilitas destinasi 3. Jumlah produk dan pelayanan pariwisata yang menerapkan kode etik pariwisata dunia 4. Kenaikan jumlah even pariwisata yang berpola kemitraan 5. Prosentase meningkatnya jumlah organisasi/ perorangan yang berusaha dibidang pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 2. PENGEMBANGAN PEMASARAN PENGEMBANGAN DESTINASI
<ol style="list-style-type: none"> 6. Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Jenis destinasi Ekowisata 2. Peningkatan jenis destinasi wisata bahari 3. Peningkatan Meeting, Incentive Travel, Conference and Exhibition (MICE) 	<ol style="list-style-type: none"> PENGEMBANGAN DESTINASI
<ol style="list-style-type: none"> 7. Meningkatnya peran Indonesia dalam kerjasama dan persahabatan antar bangsa yang dilandasi oleh sikap saling menghargai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah kerjasama internasional dibidang budaya dan pariwisata 2. Jumlah investasi baru di bidang pariwisata 3. Jumlah implementasi hasil kesepakatan kerjasama multilateral, bilateral, sub regional di bidang pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 2. PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 3. PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Sasaran	Indikator Kinerja	Program
<p>8. Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan serta sistem informasi kebudayaan dan pariwisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah keluhan data per tahun 2. Jumlah hit internet www.budpar.go.id 3. Jumlah pengguna intranet 4. Pengguna DSS 5. Tingkat persepsi / image positif dari masyarakat Indonesia terhadap Depbudpar. 6. Jumlah penelitian dan pengembangan terapan di bidang kebudayaan dan pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENGEMBANGAN KEMITRAAN 2. PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
<p>9. Meningkatnya kapasitas SDM bidang kebudayaan dan pariwisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Tingkat kebutuhan pegawai 2. Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian 3. Jumlah pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan dan pariwisata 4. Jumlah UPT yang beroperasi 5. Tingkat kompetensi pegawai sesuai bidang kerja masing-masing 6. Jumlah keikutsertaan diklat teknis Budpar 7. Jumlah diklat teknis bidang Budpar yang dilaksanakan berdasarkan rancang bangun program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENGEMBANGAN KEMITRAAN 2. PENDIDIKAN TINGGI 3. PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

C. Faktor Kunci Keberhasilan

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata membutuhkan faktor-faktor kunci penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut di atas, meliputi:

1. Stabilitas Nasional

Stabilitas nasional yang terdiri dari kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan merupakan faktor penentu utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan. Dengan stabilitas nasional yang mantap, pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan akan berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pembangunan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

2. Fasilitasi

Peran utama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai fasilitator pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan nasional. Dengan demikian, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata harus menjadi instansi terdepan yang mampu memberikan kemudahan bagi tersedianya berbagai pedoman, norma, kriteria, standar dan prosedur yang diperlukan untuk memajukan kebudayaan dan kepariwisataan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu Departemen Kebudayaan dan Pariwisata harus pula mampu memberikan dukungan, bantuan, bimbingan arahan, dan upaya-upaya rintisan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan yang dilakukan oleh seluruh stakeholders.

3. Keterpaduan

Sebagai institusi pemerintah pusat di bidang kebudayaan dan kepariwisataan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata harus mampu memposisikan diri sebagai pemandu (*conductor*) pencapaian keserasian pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan antar instansi, antar daerah dan antar stakeholders. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memerlukan faktor kunci ini untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara transparan, terkoordinasi, dan sinkron sehingga tercapai kesamaan gerak dan langkah dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan Indonesia.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata membutuhkan elemen-elemen penting penunjang pembangunan seperti anggaran, pegawai (SDM), peraturan-perundangan serta kelembagaan yang memadai agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai arah yang telah ditentukan. Ketersediaan berbagai elemen ini akan memberi kemudahan dalam melakukan berbagai upaya peningkatan. kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat secara luas.

BAB V

STRATEGI DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2005-2009

A. KEBIJAKAN

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kebudayaan dan kepariwisataan nasional, maka arah kebijakan pembangunan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu stakeholders/pemangku pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional, maka pada tahun 2005 - 2009 diarahkan untuk empat (4) kebijakan yaitu :

- 1. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan kebudayaan dan pariwisata;**
- 2. Meningkatkan efektivitas peran sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata;**
- 3. Memantapkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang kebudayaan dan pariwisata;**
- 4. Memantapkan manajemen pembangunan kebudayaan dan pariwisata.**

B. PROGRAM

Dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Nasional, program pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang akan dilaksanakan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata di Tahun 2005 - 2009 terdiri atas 9 program pokok yaitu:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

Program Pengembangan Nilai Budaya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat Indonesia atas nilai-nilai budaya yang tumbuh di seluruh daerah sebagai dasar dalam pengembangan

yang berwawasan kebudayaan yang dilaksanakan melalui kegiatan pokok antara lain :

- a. Peningkatan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa;
- b. Peningkatan Pelestarian Tradisi;
- c. Pengembangan Masyarakat Adat;
- d. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Nilai Budaya di seluruh wilayah Indonesia;
- e. Pendukung Pengembangan Nilai Budaya Daerah; dan
- f. Pelaksanaan Koordinasi, Pelayanan Teknis dan Administrasi Pengembangan Nilai Budaya.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

Program Pengelolaan Keragaman Budaya bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan apresiasi masyarakat di bidang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan film, melalui kegiatan-kegiatan pokok:

- a. Pengembangan dan Pelestarian Kesenian;
- b. Pengembangan Perfilman;
- c. Pengembangan Galeri Nasional;
- d. Pendukung Pelaksanaan Festival/peristiwa Budaya Daerah;
- e. Pendukung Pengembangan Keragaman Budaya Daerah, dan
- f. Pelaksanaan Koordinasi, Pelayanan Teknis dan Administrasi Pengelolaan Keragaman Budaya.

3. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya penanaman nilai-nilai kekayaan budaya Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok seperti :

- a. Pengembangan Nilai Sejarah;
- b. Pengembangan Geografi Sejarah;
- c. Pengelolaan Peninggalan Bawah Air;
- d. Pengelolaan Peninggalan Purbakala;
- e. Pengelolaan Permuseuman;
- f. Pengembangan Pemahaman Atas Kekayaan Budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah;
- h. Pendukung Pengembangan Kekayaan Budaya Daerah, dan
- i. Pelaksanaan Koordinasi, Pelayanan Teknis dan Administrasi Pengelolaan Keragaman Budaya.

4. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, bertujuan untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan daya saing global destinasi, produk dan usaha pariwisata nasional dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok antara lain :

- a. Pengembangan Standarisasi Pariwisata;
- b. Pengembangan Produk Pariwisata;
- c. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pengembangan Usaha Pariwisata;
- e. Pendukung Pengembangan Pariwisata Daerah;
- f. Perintisan Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan
- g. Penyusunan Kebijakan dan Pengaturan Pengembangan Destinasi Pariwisata.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN

Program Pengembangan Pemasaran bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar industri kebudayaan dan pariwisata Indonesia melalui berbagai upaya pemasaran dan promosi terpadu, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri, untuk memantapkan citra Indonesia di dunia internasional dalam rangka mendorong peningkatan apresiasi

industri budaya nasional, peningkatan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatan pariwisata nusantara melalui implementasi kegiatan-kegiatan pokok :

- a. Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Negeri;
- b. Promosi Kebudayaan dan Pariwisata di luar negeri;
- c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Pengembangan Informasi Pasar Wisatawan;
- e. Pendukung Pengembangan Kebijakan Pemasaran Pariwisata Daerah;
- f. Pendukung Promosi Destinasi Pariwisata Daerah;
- g. Pelaksanaan Koordinasi, Pelayanan Teknis dan Administrasi Pengembangan Pemasaran dan
- h. Pengembangan Meeting Incentive Contention and Exhibition (MICE).

6. PROGRAM PENINGKATAN KEMITRAAN

Program Peningkatan Kemitraan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dan kerjasama antar lembaga guna mendukung pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok:

- a. Pengembangan Kebijakan SDM Kebudayaan dan Pariwisata Nasional;
 - b. Peningkatan Profesionalisme dan Daya Saing SDM Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. Pengembangan Arkeologi Nasional;
 - e. Pendukung Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kebudayaan dan Kepariwisataan Daerah, dan
 - f. Pengembangan dan Pemantapan Kebijakan Kemitraan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
-

7. PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

- a. Peningkatan Profesionalisme dan Daya Saing SDM Kebudayaan dan Pariwisata.

8. PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK

Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik diarahkan untuk mendukung pengelolaan operasional kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan melakukan kegiatan-kegiatan pokok :

- a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan;
- b. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran;
- c. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan;
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Perlengkapan Departemen.

9. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN KETATALAKSANAAN

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan ditujukan untuk mendorong terwujudnya manajemen pembangunan kebudayaan dan pariwisata dan keterpaduan gerak antar stakeholders dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendorong pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional melalui kegiatan-kegiatan pokok antara lain:

- a. Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik;
 - b. Peningkatan Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara;
 - d. Pembinaan/Penyelenggaraan Kerjasama Internasional;
 - e. Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi;
 - f. Pengembangan Perencanaan dan Hukum Pusat;
 - g. Pendukung Kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata.
-
-

10. PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA

Program Pengawasan Aparatur Negara untuk mewujudkan good governance dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata melalui kegiatan-kegiatan pokok antara lain :

- a. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengawasan;
- b. Penataan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- c. Peningkatan Kualitas dan Integritas SDM Inspektorat Jenderal;
- d. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dan Akuntabilitas Kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dan
- e. Pelaksanaan Koordinasi, Pelayanan Teknis dan Administrasi Pengawasan Aparatur Negara.

Matriks Rencana Strategi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2005 - 2007

TUJUAN	SASARAN					CARA MENCAPI TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI)				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2009	TAHUN					KEBIJAKAN	PROGRAM
				2005	2006	2007	2008	2009		
1. Terwujudnya pembangunan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur	1. <i>Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan</i>	a. Jumlah data kebudayaan yang berhasil diinventarisasi dan didokumentasikan	266 Naskah	✓	✓	✓	✓	✓	1. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan kebudayaan dan 2. Meningkatkan efektivitas peran sebagai regulator dan fasilitator dalam Kebudayaan dan 3. Memantapkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang kebudayaan dan pariwisata 4. Memantapkan manajemen pembangunan kebudayaan dan pariwisata	1. Pengembangan Nilai Budaya 2. Pengelolaan Keragaman Budaya 3. Pengelolaan Kekayaan Budaya
			29 Film	-		✓	✓	✓		
			16 Judul Buku	-	-	✓	✓	✓		
		b. Jumlah pengunjung Museum	250.000 orang/tahun	✓	✓	✓	✓	✓		
		c. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya, baik di darat maupun di bawah air serta obyek budaya yang dilestarikan.	27.728 buah	✓	✓	✓	✓	✓		
		d. Jumlah organisasi dan pemerhati kebudayaan yang memperoleh bantuan	162 unit	✓	✓	✓	✓	✓		
		e. Menurunnya kasus pelanggaran cagar budaya	15 kasus/tahun	✓	✓	✓	✓	✓		
f. Jumlah aktivitas/event kebudayaan	140 kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓				

TUJUAN	SASARAN								CARA MENCAI TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI)	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2009	TAHUN					KEBIJAKAN	PROGRAM
				2005	2006	2007	2008	2009		
	2. Meningkatkan industri dan karya budaya yang mengacu pada budaya	a. Jumlah produk dan karya budaya yang memiliki nilai ilmu pengetahuan, sosial budaya dan ekonomi tinggi serta diakui ditingkat nasional dan internasional	45 naskah skenario 10 Film 39 buah lukisan	✓	✓	✓	✓	✓		Pengelolaan Keragaman Budaya
2. Terwujudnya pariwisata Indonesia yang berdaya Saing Global	1. Meningkatkan pariwisata Indonesia (Nasional)	a. Prosentase pertumbuhan wisatawan Manca negara	14 % /tahun	✓	✓	✓	✓	✓	1. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan kebudayaan dan	1. Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan 2. Pengembangan Destinasi Pariwisata
		b. Jumlah Wisatawan Manca Negara	8 juta orang	✓	✓	✓	✓	✓		
		c. Prosentase pertumbuhan Wisatawan Nusantara	1.5 % /tahun	✓	✓	✓	✓	✓	2. Meningkatkan efektivitas peran sebagai regulator dan fasilitator dalam Kebudayaan dan Pariwisata	3. Pengembangan Pemasaran
		d. Jumlah Wisatawan Nusantara	226 juta	✓	✓	✓	✓	✓	3. Memantapkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang kebudayaan dan pariwisata	
		e. Jumlah pengeluaran - Wisnus	Rp. 82,26 triliun	✓	✓	✓	✓	✓		
		- Wisman	USD 8 miliar	✓	✓	✓	✓	✓		
		f. Pertambahan jumlah provinsi yang menjadi tempat kunjungan wisatawan	10 %	✓	✓	✓	✓	✓	4. Memantapkan manajemen pembangunan kebudayaan dan pariwisata	

TUJUAN	SASARAN								CARA MENCAPI TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI)	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2009	TAHUN					KEBIJAKAN	PROGRAM
				2005	2006	2007	2008	2009		
	2. <i>Meningkatnya kontribusi dalam pariwisata dalam perekonomian</i>	a. Kenaikan jumlah devisa dari Wisman	USD 1Milliar/ tahun	✓	✓	✓	✓	✓		1. Pengembangan Destiansi Pariwisata
		b. Prosentase kontribusi pariwisata dalam PDB nasional	5,25 %/ Tahun	✓	✓	✓	✓	✓		2. Pengembangan Pemasaran
	3. <i>Meningkatnya produk dan pelayanan pariwisata yang</i>	a. Pertambahan jenis pelayanan di pintu masuk	18 Pintu utama	✓	✓	✓	✓	✓		1. Pengembangan Destiansi Pariwisata
		b. Jumlah peningkatan aksesibilitas dan fasilitas destinasi	58 kali	✓	✓	✓	✓	✓		2. Pengembangan Pemasaran
		c. Jumlah produk dan pelayanan pariwisata yang menerapkan kode etik pariwisata dunia	35 buah	✓	✓	✓	✓	✓		
		d. Kenaikan jumlah event pariwisata yang berpola kemitraan	4%/tahun	✓	✓	✓	✓	✓		
		e. Prosentase meningkatnya jumlah organisasi/ perorangan yang berusaha di bidang pariwisata	1%/tahun	✓	✓	✓	✓	✓		
	4. <i>Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing</i>	a. Peningkatan jenis destinasi ekowisata	32 lokasi	✓	✓	✓	✓	✓		1. Pengembangan Destiansi
		b. Peningkatan jenis destinasi wisata	26 kali	✓	✓	✓	✓	✓		
		c. Peningkatan Meeting, Incentive, Conference and Exhibition(MICE)	23 kali	✓	✓	✓	✓	✓		

TUJUAN	SASARAN						CARA MENCAPAI TUJUJANDAN SASARAN (STRATEGI)			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2009	TAHUN					KEBIJAKAN	PROGRAM
				2005	2006	2007	2008	2009		
	5. <i>Meningkatnya peran Indonesia dalam kerjasama dan persahabatan antar bangsa dengan dilandasi oleh sikap saling menghargai</i>	a. Peningkatan jumlah kerjasama internasional dibidang budaya dan pariwisata	279 kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓		1. Pengelolaan Keragaman Budaya
		b. Jumlah investasi baru di bidang pariwisata	5 buah	✓	✓	✓	✓	✓		2. Pengelolaan Kekayaan Budaya
		c. Jumlah implementasi hasil kesepakatan kerjasama multilateral, bilateral, sub-regional di bidang pariwisata	207 kali	✓	✓	✓	✓	✓		3. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3. Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang Bersih dan Berwibawa	1. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan serta sistem informasi kebudayaan dan pariwisata	a. Jumlah keluhan data budpar	10 pelanggan	✓	✓	✓	✓	✓	1. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan kebudayaan dan pariwisata	1. Pengembangan Kemitraan
										2. Meningkatkan efektivitas peran sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan Kebudayaan dan pariwisata
		b. Jumlah hit internet www.budpar.go.id	700.000 hit/tahun	✓	✓	✓	✓	✓	3. Memantapkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang kebudayaan dan pariwisata	
		c. Jumlah pengguna intranet	4.800 orang	✓	✓	✓	✓	✓		4. Memantapkan manajemen pembangunan kebudayaan dan pariwisata
		d. Pengguna DSS	11 orang	✓	✓	✓	✓	✓		
		e. Tingkat persepsi/image positif dari masyarakat Indonesia terhadap Depbudpar	80 orang	✓	✓	✓	✓	✓		

TUJUAN	SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI)	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2009	TAHUN					KEBIJAKAN	PROGRAM
				2005	2006	2007	2008	2009		
		f. Jumlah penelitian dan pengembangan terapan di bidang kebudayaan dan pariwisata	226 kali	✓	✓	✓	✓	✓		
		g. Jumlah pola kemitraan di bidang kelitbangan dan pengembangan SDM kebudayaan dan pariwisata	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓		
	2 Meningkatkan kapasitas SDM bidang kebudayaan dan pariwisata	a. Pemenuhan Tingkat kebutuhan pegawai	70 %	✓	✓	✓	✓	✓		1. Pengembangan Kemitraan 2. Pendidikan Tinggi 3. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
		b. Tingkat pelayanan administrasi	80 %	✓	✓	✓	✓	✓		
		c. Jumlah Pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan dan pariwisata	28.500 orang	✓	✓	✓	✓	✓		
		d. Jumlah UPT yang beroperasi	48 buah	✓	✓	✓	✓	✓		
		e. Tingkat kompetensi pegawai sesuai bidang kerja masing-masing	50 %	✓	✓	✓	✓	✓		
		f. Jumlah keikutsertaan Diklat Teknis Budpar	1.580 orang	—	—	✓	✓	✓		
		g. Jumlah Diklat Teknis Bidang Budpar dilaksanakan berdasarkan Rancang Bangun Program Kegiatan	21 diklat	—	—	✓	✓	✓		



Perpustakaan
Jenderal

